

ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI NUSA TENGGARA BARAT 2011-2018

Muchlisin Danu Wardana*, Abdul Wahid Mahsuni**, dan Afifudin***

Universitas Islam Malang

Email : danuwardana19@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the contribution of Regional Taxes, Regional Levies, Management of Separated Regional Assets, and other legitimate Original Regional Revenue (PAD) simultaneously and partially on District/City Financial Independence in West Nusa Tenggara. This research uses quantitative research. The research data is in the form of data previously collected and has become the documentation of the West Nusa Tenggara Regional Revenue Agency. The sample used in this research is the PAD Realization Report and the District/City Budget Realization Report in West Nusa Tenggara from 2011 to 2018. Data were analyzed statistically using SPSS for Windows v.22.0. The results of the analysis show the significance value of testing data on Regional Taxes, Regional Levies, Management of Separated Regional Assets, other legitimate PAD and Regional Financial Independence, respectively, are ,826, ,711, ,682, ,246, ,928. Based on results of the research, this can be concluded that partially Regional Taxes and other Legitimate Original Regional Income have a significant effect on Regional Independence. Meanwhile, Regional Levies and Management of Separated Regional Assets do not have a significant effect on Regional Independence. Meanwhile, Local Taxes, Regional Levies, Management of Separated Regional Assets and other PAD simultaneously have a significant influence on Regional Independence.

Keywords: local taxes, regional levies, regional independence.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi tolak ukur tingkat kemandirian keuangan daerah karena PAD merupakan aspek pembiayaan yang harus diberi perhatian khusus dari pemerintahan itu sendiri sehingga menandakan kondisi asli keuangan daerah. Pada struktur PAD yang kuat mempunyai dampak pembiayaan yang kuat juga. Untuk dana alokasi umum serta dana alokasi khusus dan juga berbagai bentuk transfer lain dari pemerintah pusat hanya menjadi pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pengembangan daerah. Jika PAD yang didapat daerah itu tinggi sedangkan DAU dan DAK yang diterima rendah maka hal ini bisa menandakan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat menjadi kecil. Dengan kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka daerah tersebut dapat dikatakan mandiri (Muliana,2009).

Pendapatan asli daerah dapat menjadi indikator untuk digunakan sebagai tolak ukur bergantungnya daerah kepada pusat. Tingginya tingkat PAD daerah dapat mengakibatkan daerah mampu menjalani kegiatan pemerintah dan pengembangan di daerah tanpa menggunakan bantuan dari pemerintah pusat. Rasio pertumbuhannya dapat menggambarkan besarnya kekuatan pemerintah daerah demi meningkatkan tingkat berhasil pada satu periode ke periode lain. Dalam mengukur kemandirian keuangan daerah yang tercermin dalam APBD dilakukan analisis rasio kemampuan, rasio kemandirian, rasio pertumbuhan dan analisis trend.

Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Berkaitan dengan semangat reformasi keuangan daerah, maka pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah dapat digunakan untuk menjadi acuan penilaian dasar kinerja keuangan. Analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dapat menjadi alat dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. (Halim, 2002).

Dikarenakan rata-rata tingkat kemandirian daerah Nusa Tenggara Barat periode 2013-2017 terjadi penurunan kemandirian daerah dengan melihat dari rasio kemandirian yang komponennya dari pendapatan dibandingkan total pendapatan yang dinyatakan bahwa masih bergantung pada pemerintah pusat. pada fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memilih judul, “Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat 2011-2018”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kontribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan, Retribusi daerah, Lain-lain PAD yang sah, serta Pajak Daerah secara simultan berpengaruh signifikan pada Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat 2011-2018.
2. Bagaimana pengaruh kontribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan, Retribusi daerah, Lain-lain PAD yang sah, serta Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan pada Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat 2011-2018.

Tujuan Penelitian

1. Agar dapat mengetahui kontribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan, Retribusi daerah, Lain-lain PAD yang sah, serta Pajak Daerah secara simultan berpengaruh signifikan pada Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat 2011-2018.
2. Untuk mengetahui kontribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan, Retribusi daerah, Lain-lain PAD yang sah, serta Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan pada Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat 2011-2018.

Kontribusi Penelitian

- a. Bagi Peneliti
Penelitian diharapkan dapat memberikan bukti nyata mengenai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah. serta diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai mekanisme penelitian.
- b. Bagi Pemerintah Daerah
Penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dimasa datang khususnya bidang pendapatan daerah.
- c. Bagi Akademisi
Penelitian diharapkan mampu memberikan masukan berupa laporan penelitian yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

TINJAUAN TEORI.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merujuk Undang-Undang No 33 tahun 2004, yang PAD memiliki arti sebagai berikut: “Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Sumber-sumber PAD :

1. Pajak Daerah;
Pajak daerah
Pemungutan yang ditarik kepada pribadi atau badan usaha oleh pemerintah daerah, tanpa mendapat kontraprestasi langsung yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk memungut pajak daerah yang bertujuan untuk digunakan sebagai pembiayaan pemerintahan daerah.
2. Retribusi Daerah;
Pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau memberikan suatu izin tertentu yang tersedia pada pemerintahan suatu daerah demi kepentingan badan usaha.
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan (Perusahaan Daerah);
Merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang diantaranya berasal dari bagian laba perusahaan daerah, pembagian laba lembaga keuangan bank.
4. Lain-lain PAD yang Sah;
Merupakan segala penghasilan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer, yang terdiri dari hibah, dana darurat, dsb. sesuai UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

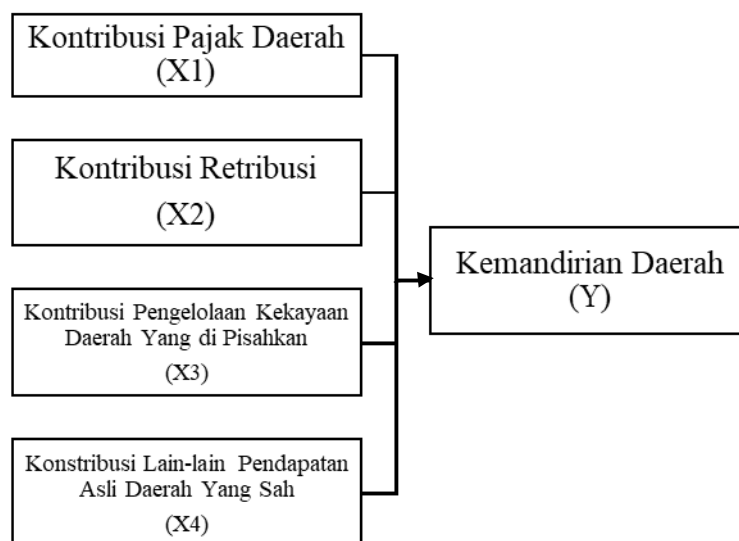
(sumber: DJPK)

Kemandirian Daerah

Berdasar pada Halim (2007:232), mandiri nya keuangan sebuah wilayah terlihat dari rendah atau tingginya Pendapatan Asli Daerah jika menghitung perbandingan antara penerimaan sebuah wilayah yang berasal dari sumber lainnya, seperti dari dana bantuan pemerintah pusat atau hasil dana pinjaman. Kemandirian keuangan sebuah wilayah memberi gambaran bergantung nya sebuah wilayah pada hasil dari dana eksternal. Semakin besar tingkat mandiri sebuah wilayah memiliki arti bahwa tingkat bergantung nya suatu wilayah pada pihak eksternal (pemerintah pusat dan provinsi) begitu juga sebaliknya jika tingkat bergantung nya sebuah daerah kecil pada pihak eksternal.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini dijelaskan dengan bagan berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

HIPOTESIS PENELITIAN

- H1: Diduga kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
- H1a: Diduga kontribusi Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
- H1b: Diduga Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
- H1c: Diduga Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
- H1d: Diduga Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai desain penelitian kuantitatif. Data penelitian berupa data realisasi APBD Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat 2011-2018. Yang diperoleh dari tempat penelitian langsung. Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan independen. Variabel dependen yaitu Kemandirian Daerah, sedangkan variabel independennya adalah Kontribusi Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Kontribusi Retribusi Daerah, Kontribusi Lain-lain PAD yang sah, Kontribusi Pajak Daerah. Data dari penelitian ini diuji dan dianalisis menggunakan uji statistik yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi untuk pengujian hipotesa. Penelitian menggunakan SPSS Windows v.22.0.

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi PAD dan Laporan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat 2011-2018.

Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi PAD dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat 2011-2018.

Kriteria untuk ketentuan sampel yaitu:

1. DJPK yang memiliki Laporan Realisasi PAD dan Laporan Realisasi APBD Nusa Tenggara Barat selama 2011-2018 DJPK yang tidak memiliki Laporan Realisasi PAD dan Laporan Realisasi APBD secara lengkap Nusa Tenggara Barat selama 2011-2018.
2. DJPK yang tidak memiliki Laporan Realisasi PAD dan Laporan Realisasi APBD Nusa Tenggara Barat selama 2011-2018 DJPK yang tidak memiliki Laporan Realisasi PAD dan Laporan Realisasi APBD secara lengkap Nusa Tenggara Barat selama 2011-2018.

Definisi Operasional

1. Kontribusi Pajak Daerah
Pajak Daerah Provinsi terdiri dari: Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Kendaraan, Pajak Rokok.
2. Kontribusi Retribusi Daerah
Retribusi adalah pemungutan yang dimana pembayaran atas jasa atau pemberian suatu izin tertentu yang diberi oleh Pemerintah untuk kepentingan badan atau orang pribadi dalam suatu daerah.
3. Kontribusi Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
Hasil dari pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Kontribusi Lain-lain PAD yang sah
Merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari milik pemerintah daerah.
5. Kemandirian Daerah
Rasio kemandirian dapat memberikan gambaran sebagaimana partisipasi masyarakat daerah tersebut terhadap pengembangan daerah, dengan disertai besarnya rasio kemandirian maka diikuti dengan tingginya partisipasi masyarakat untuk membayar pajak serta retribusi suatu wilayah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Output yang dihasilkan dari uji *descriptive statistics* untuk mencari nilai *mean*, *standard deviation*, *maximal*, dan *minimal* di setiap variabel.

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemandirian Daerah (Y)	80	.0251	.5612	.107593	.0723906
Pajak Daerah (X1)	80	.0118	.6799	.293831	.1725309
Retribusi Daerah (X2)	80	.0033	.8296	.153576	.1577549
Pengelolaan Kekayaan Daerah (X3)	80	.0012	.8296	.113635	.1472032
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (X4)	80	.0799	.9777	.414000	.2002571
Valid N (listwise)	80				

Sumber: Hasil output SPSS

- 1 Variabel Pajak Daerah setelah dilakukan pengujian dengan statistik uji deskriptif mempunyai nilai *minimum* sebesar ,0118; nilai *maksimum* sebesar ,6799; *mean* sebesar ,293831; dengan *standar deviasi* sebesar ,1725309.
- 2 Variabel Retribusi Daerah setelah dilakukan pengujian dengan statistik uji deskriptif mempunyai nilai *minimum* sebesar ,0033; nilai *maksimum* sebesar ,8296; *mean* sebesar ,153576; dengan *standar deviasi* sebesar ,1577549.
- 3 Variabel Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan setelah dilakukan pengujian dengan statistik uji deskriptif mempunyai nilai *minimum* sebesar ,0012; nilai *maksimum* sebesar ,8296; *mean* sebesar ,113635; dengan *standar deviasi* sebesar ,1472032.
- 4 Variabel Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lingkungan setelah dilakukan pengujian dengan statistik uji deskriptif mempunyai nilai *minimum* sebesar ,0799; nilai *maksimum* sebesar ,9777; *mean* sebesar ,414000; dengan *standar deviasi* sebesar ,2002571.

Uji Normalitas

Tabel 4.3
Statistik Non Parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S)
One Sample Kolmogorov Smirnov Test

		PD	RD	PKDYP	LPADYS	KD
N		80	80	80	80	80
Normal	Mean	508,6570	24,321064	48,141991	96,447304	,357764
Parameters	Std.					
(a,b)	Deviation	389,8537	12,44074	49,63079	108,0462	,0472683
Most	Absolute	,168	,187	,192	,273	,146
Extreme	Positive	,168	,187	,192	,273	,116
Differences	Negative	-,132	-,127	-,167	-,216	-,146
Kolmogorov-Smirnov Z		,628	,700	,718	1,023	,545
Asymp. Sig. (2-tailed)		,826	,711	,682	,246	,928

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Sumber : Hasil output SPSS (2019)

Dari hasil uji normalitas dapat diketahui nilai signifikansi *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0.05 atau 5%, maka data tersebut dikatakan normal.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.4
Uji Multikolinearitas
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		Bi	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.075	.050		-1.497	.139		
	PD	.198	.067	.471	2.956	.004	.417	2.400
	RD	.050	.080	.110	.630	.530	.350	2.860
	PKDYP	.136	.083	.277	1.635	.106	.369	2.707
	LPADYS	.245	.059	.678	4.184	.000	.403	2.482

a Dependent Variable: Kemandirian Daerah

Sumber : Hasil output SPSS (2019)

Dari tabel nilai tolerance dan VIF pada variabel Pajak Daerah sebesar 0,417 dan 2,400, Retribusi Daerah sebesar 0,350 dan 2,860, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan sebesar 0,369 dan 2,707, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar 0,403 dan 2,482. Jadi, peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel dalam model regresi pada penelitian.

2. Uji Autokorelasi

Tabel 4.5
Uji Autokorelasi
Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	,294(a)	,086	-,037	1,466049	1,935

a Predictors: (Constant), PD, RD, PKDYP, LPADYS

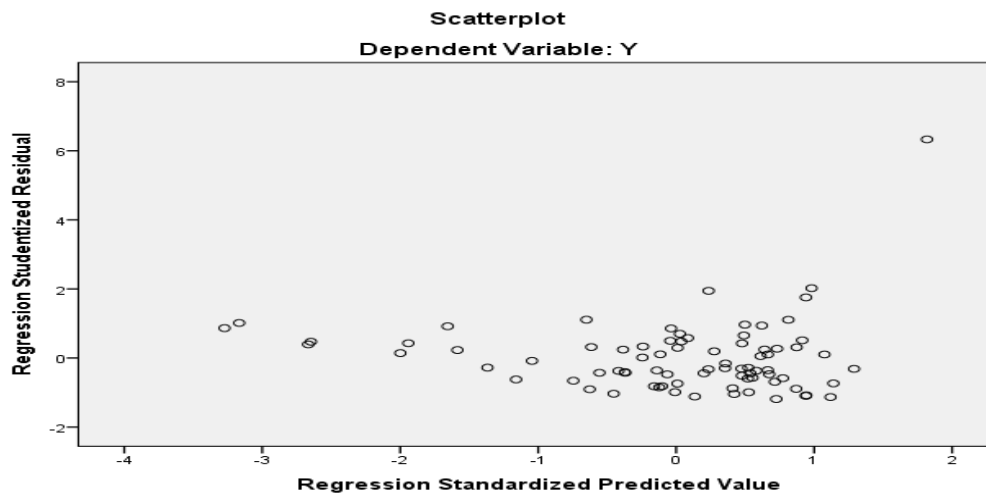
b Dependent Variable: KD

Sumber : Hasil output SPSS (2019)

Berdasarkan hasil diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* memiliki hasil pengujian berada diantara dua $<dw < 4$ dua ($1,7223 < 1,935 < 2,2777$) maka peneliti menyimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada bentuk model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.6
Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Hasil output SPSS (2019)

Berdasarkan gambar 4.6 diatas dilihat bahwa data (titik) persebarannya merata diatas dan dibawah titik nol dan tidak berkumpul disuatu posisi tertentu dan tidak membentuk suatu pola pasti, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pengujian regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4.7
Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.075	.050		-1.497	.139
	PD	.198	.067	.471	2.956	.004
	RD	.050	.080	.110	.630	.530
	PKDYP	.136	.083	.277	1.635	.106
	LPADYS	.245	.059	.678	4.184	.000

a Dependent Variable: ERC

Sumber : Hasil output SPSS (2019)

$$KD = -0,075 + 0,198 PD + 0,050 RD + 0,136 PKDYP + 0,245 LPADYS$$

Keterangan :

$\alpha = 0,001$ artinya nilai Kemandirian Daerah adalah 0,001 apabila tanpa Variabel PKDYP, RD, LPADYS, dan PD.

X1 = 0,014, artinya nilai Pajak Daerah adalah 0,014 apabila nilai Pajak Daerah naik satu satuan maka Kemandirian Daerah naik 0,014.

X2 = -0,009, artinya nilai Retribusi Daerah adalah -0,009 apabila nilai Retribusi Daerah naik satu satuan maka Kemandirian Daerah turun -0,009.

X3 = 0,039, artinya nilai Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan adalah 0,039 apabila nilai Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan naik satu satuan maka Kemandirian Daerah naik 0,039.

X4 = 0,085 artinya nilai Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah 0,085 apabila naik satu satuan maka Kemandirian Daerah naik 0,085.

UJI HIPOTESIS

1. Uji Simultan F

Uji sig. simultan (uji statistik F) bertujuan menguji seluruh variabel independen yang disertakan kedalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya yaitu: Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Pajak Daerah terhadap Kemandirian Daerah.

Tabel 4.8

**Uji F
ANOVA(b)**

Model		Sum of Squares	D	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.086	4	.021	4.893	.001b
	Residual	.328	75	.004		
	Total	.414	79			

a Predictors: (Constant), PD, RD, PKDYP, LPADYS

b Dependent Variable: KD

Sumber : Hasil output SPSS (2019)

Dari hasil analisis, didapatkan nilai F sebesar 4,893 dan signifikansi sebesar 0.001. Nilai-nilai signifikansi (0.001) lebih kecil dari α (0.05) maka variabel RD, PKDYP, LPADYS, dan PD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah.

2. Uji Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) memiliki tujuan untuk menggambarkan kemampuan model menerangkan variasi yang terdapat dalam variabel dependen. Nilai (R^2) mendekati angka satu berarti variabel independen dapat memberi informasi yang diperlukan dalam memprediksi variabel dependen.

Tabel 4.9

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.813 ^a	.661	.510	.0330736

a. Predictors: (Constant), LLP, RD, PKD, PD

Dalam pengujian koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) besar nilai R^2 adalah 0.661 hal ini artinya 66.1% variabel dependen yaitu Kemandirian Daerah dapat dijelaskan dari keempat variabel independen yang terdiri dari Retribusi Daerah, PKDYP, Pajak Daerah, dan LPADYS sisanya ($100\% - 66,1\% = 33,9\%$) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini, seperti variabel Likuiditas dan *Leverage*.

3. Uji Parsial (t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan bagaimana pengaruh antara variabel penjelas (independen) secara individu dalam menjabarkan variasi dari variabel dependen.

Tabel 4.10
Uji Parsial

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	B		
1 (Constant)	-.075	.050		-1.497	.139
X1	.198	.067	.471	2.956	.004
X2	.050	.080	.110	.630	.530
X3	.136	.083	.277	1.635	.106
X4	.245	.059	.678	4.184	.000

a. Dependent Variable: Y

a. Pengujian Hipotesis 1

Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah.

Berdasarkan hasil analisis regresi, pada variabel Pajak Daerah diperoleh nilai B sebesar 0,198, nilai t sebesar 2,956, dan nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Daerah. Maka apabila nilai signifikansi Pajak Daerah naik satu satuan maka Kemandirian Daerah naik 0,004 atau hipotesis ($H1_a$) diterima dan (H_0) ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Winda (2014) dan Erawati dan Suzan (2015) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Daerah.

b. Pengujian Hipotesis 2

Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah.

Berdasarkan hasil analisis regresi, pada variabel Retribusi Daerah diperoleh nilai B sebesar 0,050, nilai t sebesar 0,630 dan nilai signifikansi sebesar 0,530 lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah atau hipotesis ($H1_b$) diterima dan (H_0) ditolak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Winda (2014), dan Arif dan Joko (2014) yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah. Namun, hasil penelitian ini menolak penelitian yang dilakukan oleh Yanuar, Eddy dan Rina (2014), dan Erawati dan Suzan (2015) yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Daerah.

c. Pengujian Hipotesis 3

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah.

Berdasarkan hasil analisis regresi, pada variabel Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan diperoleh nilai B sebesar 0,136, nilai t sebesar 1,635 signifikansi sebesar 0,106 lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah atau hipotesis ($H1_c$) ditolak dan (H_0) diterima.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Erawati dan Suzan (2015) yang menyatakan bahwa Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah.

d. Pengujian Hipotesis 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah

Berdasarkan hasil analisis regresi, pada variabel Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diperoleh nilai B sebesar 0,245, nilai t 4,184 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah atau hipotesis (H_{1d}) diterima dan (H_0) ditolak.

Hasil penelitian ini menolak penelitian yang dilakukan oleh Erawati dan Suzan (2015) yang menyatakan bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara simultan atau bersama-sama retribusi Daerah, Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dan PKDYP secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Pada daerah Nusa Tenggara Barat untuk periode penelitian 2011-2018.
2. Secara parsial Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah pada Daerah Nusa Tenggara Barat. Sementara PKDYP dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah pada Daerah Nusa Tenggara Barat.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain :

1. Penelitian ini mempunyai kekurangan variabel dalam menjelaskan faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi Kemandirian Daerah.
2. Terdapat data *outlier* dalam penelitian yang dilakukan, sehingga hasil yang ingin dicapai dirasa jauh dari nilai maksimal untuk mendapatkan hasil yang diinginkan peneliti.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar dapat mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu :

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dimasa datang khususnya bidang pendapatan daerah.
2. Untuk peneliti selanjut bisa meneliti semua Laporan Realisasi Anggaran Daerah yang terlapor di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
3. Perlu ditambahkan lagi variabel lain seperti variabel Liquiditas dan Leverage untuk memperjelas faktor yang mungkin dapat mempengaruhi Kemandirian Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE UGM, 2001.
- Brotodihardjo, Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : Eresco, 1989.
- Chottob, Iskandar & Imam Suhardjo, *Dari Sentralisasi ke Otonomi : DKI Jakarta, Implementasi UU No.34 Th. 1999*. Jakarta : Penerbit DPRB DKI Jakarta, 2000.
- Davey, K.J. *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Jakarta : UI Press, 1988
- Devas, Nick. *Kuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : Penerbit UI, 1989.
- Halim, Abdul. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2001.
- Ismail, Tjip. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Jakarta Yellow Printing, 2007.
- Koswara, E. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta : Yayasan PARIBA, 2005.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi, 2002.
- Mustaqiem. *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta : UII Press, 2008.
- Prakoso, Kesit B. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press, 2003.
- Riduansyah, M. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah daerah Kota Bogor)*. Jakarta : Pusat Pengembangan dan Penelitian FISIP UI, 2001.
- Sidik, Machfud. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Orasi Ilmiah, STIA LAN Bandung, 2002.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
- _____. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- _____. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

_____. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah

_____. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah

*) Muchlisin Danu Wardana adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Malang

**) Abdul Wahid Mahsuni adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang

***) Afifudin adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang